

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan menjadi perhatian yang sangat penting di negara manapun, terutama di Indonesia. Semua individu memiliki hak untuk mengakses semua layanan keuangan formal dan berkualitas kapan pun dan di mana pun dengan infrastruktur yang ada dan inklusi keuangan tersedia. Suatu kondisi bagi warga negara untuk memiliki akses yang terjangkau atas berbagai layanan keuangan formal dengan mutu yang tinggi, tepat waktu, aman, dan lancar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

Berdasarkan data, Indeks Keuangan Inklusif dari tahun ke tahun terus meningkat. Indeks Inklusi Keuangan pada tahun 2019 sebesar 76,19%, naik 8,39% dari 67,8% pada tahun 2016. Dapat diasumsikan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang dapat menjangkau akses dan mempergunakan layanan jasa keuangan, namun belum sepenuhnya memahami layanan tersebut. Artinya keselerasan yang diutarakan oleh otoritas jasa keuangan belum tercapai. Literasi keuangan dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inklusi keuangan (Sari & Kautsar, 2020), (Pulungan & Ndururu, 2019).

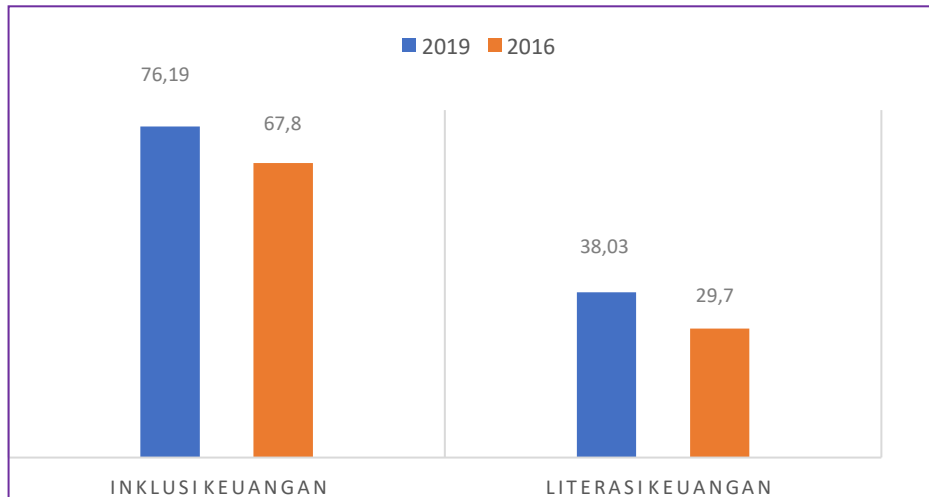
Literasi keuangan sangat penting bagi setiap orang untuk

menghindari masalah keuangan, karena setiap orang sering menghadapi trade-off, situasi di mana satu orang harus mengorbankan satu kepentingan demi kepentingan orang lain. Menurut (OJK, 2021) literasi keuangan merupakan pemahaman, keyakinan, dan keahlian yang dapat berpengaruh pada perilaku untuk mencapai kesejahteraan dengan pengambilan keputusan dan penanganan keuangan yang lebih berkualitas. Tidak hanya menambah pemahaman, tetapi juga untuk mengubah perilaku pengelolaan keuangan dengan cara yang meningkatkan kesejahteraan bersama.

Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 38,03% pada tahun 2019, naik 8,33% dari tahun sebelumnya sebesar 29,7% pada tahun 2016. yang berarti dari 100 orang penduduk terdapat sekitar 38 orang yang well literate (literasi keuangan yang baik. Hasil ini menunjukkan peningkatan dari survei sebelumnya yakni 29,7% di tahun 2016, meskipun menunjukkan peningkatan di sisi lain data ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat Indonesia yang belum well literate.

Saat ini masih terdapat gap yang cukup tinggi antara indeks literasi (38,03%) dan inklusi keuangan (76,19%), artinya dari setiap 100 orang terdapat sekitar 76 orang yang inklusif namun hanya sekitar 38 orang yang well literate. Dapat diasumsikan bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang dengan mudah mengakses dan mampu menggunakan layanan jasa keuangan namun tidak memiliki pemahaman serta pengetahuan yang baik

terhadap layanan tersebut. artinya jauh dari kata keselarasan dan kesinambungan seperti yang di ungkapkan oleh otoritas jasa keuangan.



Sumber: Survei Nasional Literasi Keuangan 2019

Gambar 1. 1
Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia

Untuk mengatasi gap tersebut tentunya, upaya seperti sosialisasi dan edukasi mengenai literasi keuangan diperlukan untuk mengisi kesenjangan ini. Karena meskipun indeks inklusi keuangan tinggi, jika tidak sejalan dengan literasi keuangan, masyarakat tidak akan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti risiko, kewajiban, pendanaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan produk keuangan. Mengenalinya literasi dan inklusi keuangan bagi perkembangan masyarakat. Ini mungkin menjadi perhatian pemerintah saat ini.

Menurut (Fitria Aidal Fitroh, 2019), OJK sebagai regulator telah mengeluarkan program literasi keuangan bernama Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan masyarakat di bidang keuangan. Dalam

program ini, OJK menasar kalangan tertentu seperti pelajar, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), profesional, wanita, pekerja kantoran yang diharapkan dapat mendorong pencapaian literasi keuangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, literasi keuangan sangat diperlukan bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, agar UMKM dapat menentukan pilihan dan menggunakan produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhannya, melaksanakan perancangan keuangan yang lebih baik dan menghindari ketidakjelasan investasi instrumen keuangan (Djuwita dan Yusuf 2018). UMKM adalah salah satu faktor penting dalam mencapai kesejahteraan dan literasi keuangan di Indonesia.

Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) No. 20 Tahun 2008 mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau unit usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi mandiri produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi dari perusahaan yang memiliki, menguasai, atau turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam. Dalam hal usaha kecil dijelaskan dalam Undang-undang, sedangkan usaha menengah ialah usaha mandiri yang didirikan oleh perorangan yang tidak mempunyai cabang atau anak perusahaan dengan ketentuan pendapatan penjualan sesuai undang-undang.

UMKM memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam

perekonomian yang memberikan 60% dari produk domestik bruto dan 97% tenaga kerja negara (SP-38/DKNS/OJK/5/2016). UMKM sangat menyokong perekonomian negara sangat membutuhkan kekuatan UMKM. Salah satu cara untuk memperkuat ialah menciptakan peningkatan kapasitas UMKM dalam menata ekonomi dan memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan program guna menciptakan peningkatan kapasitas dan pengelolaan UMKM dengan program inklusi keuangan dan literasi UMKM.

(Suryani¹ & Ramadhan², 2018) mengungkapkan UMKM di Kota Pekanbaru memiliki tingkat literasi keuangan level sedang dengan menguji variabel pendidikan dan tingkat pendapatan yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan, namun literasi keuangan UMKM tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin dan usia. Hasil penelitian (Widowati & Winarto, 2017) menjelaskan UMKM di Kota Semarang memiliki tingkat literasi keuangan yang relatif rendah dengan responden not literate yang mendominasi sebesar 36%, sufficient literate 27%, less literate 28%, dan well literate 9%. Penelitian tersebut juga mengungkapkan minimnya literasi keuangan di kalangan UMKM di Semarang disebabkan oleh kurangnya peran lembaga terkait dalam memberikan edukasi. Maka literasi keuangan tidak berpengaruh pada inklusi keuangan.

Selain itu, beberapa penelitian memberikan hasil literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan dan positif pada inklusi keuangan (Kusuma, 2019)(Hutabarat, 2018)(Mindra & Moya, 2017)(Pulungan & Ndururu,

2019). Hasil penelitian menunjukkan literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan positif pada inklusi keuangan. Hal ini mengindikasikan pemahaman keuangan yang semakin tinggi akan diikuti oleh sikap dan perilaku keuangan yang lebih baik serta dapat menciptakan peningkatan pemahaman dan penggunaan jasa dan produk keuangan.

Literasi dan inklusi keuangan yang meningkat akan memudahkan akses peningkatan kualitas UMKM, jangkauan UMKM yang lebih luas, serta penggunaan *financial technology* yang lebih optimal (Badan Jasa Keuangan 2020). *Financial technology* merupakan penggunaan teknologi yang memanfaatkan sistem keuangan dalam menciptakan suatu produk, jasa, atau model bisnis baru untuk memberikan pengaruh yang signifikan bagi kestabilan ekonomi moneter, sistem keuangan, keamanan, kelancaran, efisiensi, serta keandalan pada sistem pembayaran.

Menurut (Liliana et al., 2021) kehadiran fintech berperan dalam usaha peningkatan inklusi keuangan, fintech akan mendukung masyarakat terutama pengusaha UMKM untuk memiliki pilihan dan jangkauan layanan keuangan yang memfasilitasi hal tersebut. Oleh karena itu, menurut (Erlianta, 2020) diperlukan peran kelembagaan untuk menciptakan peningkatan literasi keuangan dengan menyediakan akses keuangan dan pembayaran yang mudah. Indonesia telah memiliki beberapa perusahaan fintech yang maju, antara lain *Financing and Investment, Digital Paymen, Information Feeder Site, Account Aggregator*, dan *Personal Finance*. Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan bahwa kredit P2P

individu/perusahaan mengalami perkembangan sebesar 40% pada 2018. Perkembangan terbesar berikutnya sebesar 34% pada fintech (pembayaran) (Jayani, 2019).

Menurut *Institute for Development of Economics and Finance* dalam (Firdaus & Hendratmi, 2019) sekitar 60 juta pelaku UMKM. Hanya 11 juta UKM yang bankable. Dari total kebutuhan kredit UMKM sebesar Rp 1,649 triliun secara nasional, sisanya sebanyak 49 juta UMKM tidak dapat menggunakan bank. Sedangkan kapasitas bank hanya Rp660 triliun dengan selisih Rp989 triliun. Kebutuhan pendanaan yang semakin besar di Indonesia, akan menjadi kesempatan untuk perusahaan fintech peer-to-peer landing dalam pemenuhan kebutuhan pendanaan. Pembiayaan dengan Fintech belum dikenal di kalangan UMKM karena pelaku UMKM merasa lebih percaya diri dan aman jika menyangkut perbankan atau swadana. penelitian yang dilakukan (Liliana et al., 2021) berpendapat bahwa fintech memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan. Penelitian oleh (Marini et al., 2020) menjelaskan bahwa variabel *fintech* mempengaruhi inklusi keuangan UMKM di Tangerang Selatan. Hal ini didukung oleh (Hamzah & Suhardi, 2020) yang menjelaskan *financial technology* mempengaruhi inklusi keuangan secara signifikan positif di Kabupaten Kuningan. *Financial technology* menjadi perantara dalam pemenuhan kebutuhan pelaku usaha. Tidak hanya modal namun sistem pembayaran. akan tetapi didukung oleh penelitian (Sari & Kautsar, 2020) menunjukkan bahwa *financial technology* tidak berpengaruh terhadap inklusi

keuangan. (Michelle, 2016) menunjukkan hasil yang sama bahwa financial technology secara negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan.

Menurut (Muzdalifa et al., 2018), pengenalan penggunaan fintech di sektor perbankan telah memfasilitasi akses ke penawaran layanan keuangan oleh UMKM, sekaligus mempromosikan inklusi keuangan dan meningkatkan kinerja sektor perbankan. Klasifikasi layanan fintech mencakup lima kategori layanan antara lain sistem pembayaran, dukungan pasar, manajemen investasi, pembiayaan pinjaman, dan layanan keuangan lainnya yang diatur oleh Bank Indonesia Edisi 19/12/PBI/2017 dan beberapa di antaranya dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan mengupayakan inklusi keuangan dengan Program laku Pandai, BPD, peran KUR, pengembangan model pembiayaan fintech financing, dan pembentukan TPKAD. UMKM adalah pelaku usaha ekonomi yang 90% memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan beragam, maka fenomena ini akan diteliti melalui para pelaku Usaha M bordir yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Kecamatan Sukaraja. Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah UMKM sebanyak 253.908 unit pada tahun 2021 akan tetapi yang tercatat di DISKOPINDAG Kabupaten Tasikmalaya per oktober 2022 sebanyak 20.927 unit. UMKM dengan kategori kecil sebanyak 14.251 unit, UMKM dengan kategori

menengah kecil sebanyak 2.457,UMKM dengan kategori tinggi sebanyak 3.391 unit, dan UMKM dengan kategori menengah tinggi sebanyak 828 unit. Untuk meminimalisir proses penelitian maka penelitian dilakukan di salah satu kecamatan yaitu kecamatan Sukaraja.

Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar didominasi oleh bidang usaha bordir, kerajinan anyaman dan kuliner. Meskipun UMKM menempati posisi penting dalam perekonomian nasional, para pelaku industri ini masih menghadapi banyak kendala. Hambatan tersebut meliputi beberapa keterbatasan seperti sumber daya manusia (SDM), modal usaha, dan teknis. Menurut (Setianto et al., 2016) dalam (Hasanah, Riyan Latifahul, 2020) UMKM secara umum merupakan penyumbang potensial bagi perekonomian nasional. Kabupaten Tasikmalaya terletak di Provinsi Jawa Barat dijalur utama selatan Pulau Jawa. Kabupaten Tasikmalaya berpotensi menciptakan aneka ragam produk kerajinan yang dapat menarik khalayak ramai dengan home industry. Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya mayoritas adalah ‘*home industry*’ yang menjadi pengalaman dengan keahlian dan keterampilan.

Tabel 1. 1
Data Sentra Indutri Kerajinan Di Kabupaten Tasikmalaya

No	Industri	Unit Usaha
1	Kerajinan Mendong	1.556
2	Kerajinan Pandan	974
3	Kerajinan Bambu	3.131
4	Bordir	2.713
5	Olahan Makanan	4.414
6	Bahan Kontruksi	1.035

Sumber: Data dari DISPERINDAG Kabupaten Tasikmalaya 2022

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan jumlah industri kerajinan

kabupaten Tasikmalaya memiliki berbagai macam produk buatan lokal seperti anyaman, bahan konstruksi, bordir, serta olahan makanan. Berikut adalah komoditas unggul kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : pertama, jenis usaha yang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi berdasarkan jumlah unit usaha seperti kerajinan mendong dan kerajinan bambu. Bordir dan olahan makanan merupakan unit usaha yang paling tinggi, sementara unit usaha yang paling rendah adalah kerajinan pandan dan bahan konstruksi. Bordir adalah komoditas unggul yang ada di Kabupaten tasikmalaya . Hal menjadi menarik untuk peneliti meneliti pada industry bordir.

Tabel 1. 2
Data Industri Bordir di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021

No	Kecamatan	Unit Usaha
1	Cineam	20
2	Salopa	198
3	Manonjaya	30
4	Cikalong	221
5	Cikatomas	172
6	Jatiwaras	127
7	Karangnunggal	234
8	Cisayong	5
9	Singaparna	35
10	Sariwangi	87
11	Leuwisari	50
12	Sukaraja	348
13	Padakembang	55
14	Tanjungjaya	74
15	Sukarame	95
16	Rajapolah	15
17	Cipatujah	169
18	Sodonghilir	86
19	Bantarkalong	29

No	Kecamatan	Unit Usaha
20	Bojongasih	35
21	Bojonggambir	30
22	Sukaratu	92
23	Puspahiang	58
24	Culamega	80
25	Taraju	23
26	Pancatengah	118
27	Salawu	72
28	Sukahening	120
29	Parungponteng	50

Sumber: Data dari DISPERINDAG Kabupaten Tasikmalaya 2022

Berdasarkan Tabel 1.2. menunjukkan bahwa 29 kecamatan yang mengoperasikan usaha industri bordir yang mana kecamatan sukaraja mendominasi. Bordir adalah suatu kerajinan yang dibuat dan diciptakan dengan cara tradisional dan manual dengan tenaga manusia. Dengan teknologi yang semakin berkembang, bordir dapat dilakukan dengan menggunakan mesin komputer. Di Tasikmalaya bordir menjadi produk unggulan.

Bordir ialah sebuah teknik dengan benang dan jarum untuk mempercantik kain (Kurnia, 2015). Produksi bordir yang semakin meningkat di Kabupaten Tasikmalaya tepatnya di Kecamatan Sukaraja yang menjadikannya pusat kerajinan bordir dibuktikan dengan semakin banyaknya pengusaha bordir yang mulai meninggalkan mesin manual ke mesin komputer. Tidak hanya mesin bordir, masyarakat tetap perlu memperhatikan tenaga kerja, modal, serta motif desain.

Tabel 1. 3
Data Sentra Industri Bordir di Kecamatan Sukaraja Tahun 2021

No	Desa	Unit Usaha
1	Janggala	22
2	Leuwibudah	37
3	Margalaksana	70
4	Mekarjaya	19
5	Sirnajaya	17
6	Sukapura	21
7	Tarunajaya	137
8	Linggaraja	25

Sumber: Kecamatan Sukaraja 2022

Berdasarkan tabel 1.3 usaha bordir di Kecamatan Sukaraja telah dijalankan oleh 8 desa termasuk unit usaha.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, fenomena ini menarik untuk diteliti karena masih ada hasil penelitian yang menunjukkan perbedaan hasil dan berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan bahwa untuk mempercepat program strategis nasional literasi keuangan pada masyarakat Indonesia, sasaran utama yang ingin dicapai adalah UMKM oleh karena itu,peneliti bermaksud untuk menganalisa apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada pelaku usaha bordir dan bagaimana pengaruh *financial technology* terhadap inklusi keuangan. Sehingga judul penelitian ini adalah “Pengaruh Literasi Keuangan dan *Financial Technology* terhadap inklusi keuanngan pada pelaku usaha mikro bordir di kecamatan Sukaraja kabupaten Tasikmlaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada

pelaku usaha mikro bordir di kecamatan sukaraja kabupaten Tasikmalaya.

2. Apakah *financial technology* berpengaruh terhadap inklusi keuangan pada pelaku usaha mikro bordir di kecamatan sukaraja kabupaten Tasikmalaya.

C. Tujuan penelitian

Dari latar belakang permasalahan di atas dapat disimpulkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan pada pelaku usaha mikro bordir di kecamatan sukaraja kabupaten Tasikmalaya.
2. Menganalisis pengaruh *financial technology* terhadap inklusi keuangan pada usaha mikro bordir di kecamatan sukaraja kabupaten Tasikmalaya.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan di berikan Batasan penelitian yaitu peneliti hanya berfokus pada jasa keuangan perbankan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis :

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Sebagai bahan literasi terkait inklusi keuangan, literasi keuangan, dan tingkat pemahaman dalam menggunakan *financial technology*.
- b. Sebagai bahan pembelajaran dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis :

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam perencanaan pengembangan untuk meningkatkan literasi keuangan serta inklusi keuangan UMKM.
- b. Sebagai bentuk dorongan untuk perusahaan *financial teknologi* dengan mengedukasi terkait keuangan UMKM agar lebih memahami keunggulan Fintech.

